



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agustino, Leo, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Alisjahbana, Armida Salsiah dan Murniningtyas, Endah, 2018, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Strategi Implementasi*, UNPAD Press, Bandung.
- Arifin, Syamsul, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Artha, I Nengah, 2016, *Struktur Organisasi Sistem Subak Di Bali, Bahan Ajar Sistem Subak*, Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Denpasar.
- Asdak, Chay, 2012, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Asian Development Bank, 2003, *Indonesian Regulatory Review Manual*, Asian Development Bank dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta.
- Bappenas, 2011, *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*, Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Jakarta.
- Barker, D.L.A., 2014, *Law Made Simple*, Thirteenth Edition, Routhledge Taylor and Francis Group London and New York.
- Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS, 2011, *Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/ Bappenas*, Bappenas, Jakarta.
- Bottero, Milena, Jack Cornforth, Felix Dodds, Jeannet Lingan, Kirsty Schneeberger, Andrew Shaw, Nadine Smith, Janet Strachan, dan Robert White, 2011, *A Pocket Guide to Sustainable Development Governance*, Second Edition, Stakeholder Forum Commonwealth Secretariat, London.
- Conyers, Diana, 1991, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, UGM Press, Yogyakarta.



- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Sistem Subak di Bali*, Direktorat Jendral Kebudayaan, Jakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum, 1998, *Kamus Tata Ruang*, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Tata Ruang, 2020, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tata Ruang Tahun 2020: Tata Ruang Pintu Masuk Terbaik Bagi Investasi Menuju Negeri Makmur, Adil, dan Sejahtera*, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Jakarta.
- Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, 2022, *Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Subak dan Subak Abian Provinsi Bali Tahun 2022*, Pemerintah Provinsi Bali, Denpasar.
- Engels, Frederick, 2007, *On Marx's Capital (Tentang Das Kapital Marx)*, Alih Bahasa Oey Hay Djoen, Oey's Renaissance, Jakarta.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto, Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fariied, Ali dan Andi Syamsu Alam, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah*, Refika Aditama, Bandung.
- Ford Foundation dan KPPOD, 2013, *Panduan Pembuatan Kebijakan (Perda Ramah Investasi)*, Ford Foundation bekerjasama dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta.
- Freidman, Lawrence M., 1975, *The Legal System (A Social Science Prespective)*, Terj. M.Khozin, Cetakan IV 2018, Nusa Media, Bandung.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, PT . Rajagrafindo Perkasa, Jakarta.
- Hauerstein, Kai dan Peter Bissegger, 2009, *Training Manual Regulatory Impact Assessment*, GTZ-Red dan Bappenas RI, Jakarta.



- Heroepoetri, Arimbi dan Santosa, M., A., 1993, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, WALHI dan YLBHI (USAID), Jakarta.
- Horton, Paul, B., dan Chester L. Hunt, 1996, *Sosiologi Jilid 2*; alih bahasa Aminuddin Ram Tita Sobari, Erlangga, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ismail, Nurhasan, 2008, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi-Politik (Perubahan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial dan Kelompok yang Diuntungkan)*, Huma dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Hukum Agraria dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang.
- Isra, Saldi, 2001, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta.
- Istanto, F.Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV.Ganda, Yogyakarta.
- Juniarso, Ridwan dan Ahmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2007, *Buku Pegangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hasil penjaminan kualitas terhadap KLHS Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Air Provinsi Bali*, Asiten Deputi Urusan Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, *Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Lahan di Danau Batur serta Daerah Tangkapan Airnya Berbasis Pada Daya Dukung Lingkungan Hidup*, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara, Denpasar-Bali.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Lahan di Danau Beratan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan serta Daerah Tangkapan Airnya Berbasis Pada Daya Dukung Lingkungan Hidup*, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara, Denpasar-Bali.



- \_\_\_\_\_, 2015, *Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekoregion Pulau Bali*, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara, Denpasar-Bali.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, *Rencana Pengelolaan Lanskap Budaya Subak Provinsi Bali*, Direktorat Internalisasi Nilai dan Diploma Budaya, Direktorat Jendral Kebudayaan, Cetakan I, Jakarta.
- Kerlinger, Fred N., 1996, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, diterjemahkan Landung R. Simatupang, Cet.Kelima, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Koeswahyono, Imam, 2012, *Hukum Penatagunaan tanah dan Penataan Ruang di Indonesia (Problematika Antara Teks dan Konteks)*, UB Press, Malang.
- Lubis, Solly, 2014, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*, Mandar Maju, Bandung.
- Loekman, Soetrisno,, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Marhaendra Wija Atmaja, Gede, Nyoman Mas Aryani, Anak Agung Sri Utari, dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, 2017, *Pluralisme Konstitusional dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Studi Interpretasi atas Putusan mahkamah Agung dalam Perkara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009)*, ANDI Offset, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2010, *Penelitian hukum*, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Meadows, Donella H., Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, dan William Behrens III, 1972, *The Limit To Growth, A Report For The Club Rome's Project On The Predicament of Mankind*, Fifth Printing, Universe Books, New York.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin dan Fadilah Putra, 2015, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroe press, Surabaya.



- Muta'ali, Lutfi, 2019, *KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Pengalaman Penyusunan KLHS RTRW dan RPJMD)*, Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nurseppy, Ida, Paryadi, dan David Ray, 2002, *Buku Pedoman Kaji Ulang Peraturan Indonesia*, Balitbang Deperindag, USAID, PEG, Bali.
- OECD, 2008, *Building an institutional Framework for Regulatory Impact Analysis: Guidance For Policy Maker*, Version 1.1., Regulatory Policy Division Directorate for Public Governance and Territorial Development, Paris-Prancis.
- Rheza, Boedi, 2013, *Menyusun dan Menilai Perda Ramah Investasi*, KPPOD-BRIEF, Edisi Januari-Februari 2013, Jakarta.
- Riva'i, Andi Kardian, 2016, *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi dalam Pembangunan Sosial*, Penerbit Hawa dan Ahwa, Pekanbaru-Riau.
- Sadyohutomo, Mulyono, 2016, *Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sadler, Barry, 2005, *Strategic Environmental Assessment at the Policy Level: Recent Progress, Current Status and Future Prospect*, Ministry of The Environment, Czech Republic, Praha.
- Schubeler, Peter, 1996, *Urban Management and Infrastructure : Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management*. The World Bank, Washington, D.C.
- Setiawan, Dody, 2017, *Pengantar Kebijakan Publik*, Intelegensia Media, Malang.
- Sibuea, Hotma, P., 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sumarjono, Maria, SW., 2014, *Bahan Kuliah: Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., Nurhasan Ismail, Ernan Rustiadi, dan Abdullah Aman Damai, 2014, *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia (kajian Kritis*



*Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*), Cetakan kedua (revisi), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Suripin, 2002, *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*, Andi Offset, Yogyakarta.

Sutawan, Nyoman, 2008, *Organisasi dan Manajemen Subak di Bali*, PT. Offset BP, Denpasar.

Sutha, I Gusti Ketut., 1978, *Meninjau Persubakan di Bali*, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar.

Triono, Eddy, 2015, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perencanaan Wilayah Dan Tata Ruang*, Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

Wardana, Agung, 2018, *Contemporary Bali: Contested Space and Governance*, Palgrave Mcmillan Springer Nature Singapore Pre Ltd., Singapore.

Wiana, I Ketut, 1999, *Tri Hita Karana Konsep Ekologi-Teologi*, Paramita, Surabaya.

Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik: Teori & Proses*, edisi revisi cetakan pertama Media Pressindo, Yogyakarta

Windia, Wayan, dan Wayan Alit Artha Wiguna, 2013, *Subak Warisan Budaya Dunia*, Udayana University Press, Cetakan Pertama, Denpasar.

Windia, Wayan, Sudarta Wayan dan Sri Astiti, Wayan, 2015, *Sistem Subak di Bali (Kajian Sosiologis)*, Udayana University Press, Denpasar.

Windia, Wayan P. dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, cetakan pertama Maret 2006, Denpasar.

World Bank, 2012, *Getting to Green: A Sourcebook Of Pollution Management Policy Tools For Growth And Competitiveness*, The International Bank for Reconstruction And Development, Washington.

Yuliandri, 2014, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.



Yunus Wahid, A.M., 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

## **B. DISERTASI**

Irfan, Maksum Ridwan, 2007, *Desentralisasi Dalam Pengelolaan Air Irigasi Tersier (Suatu Studi dengan Kerangka Konsep Teritorial dan Fungsional di Kabupaten Kota Tegal-Jawa Tengah, Kabupaten Jembrana-Bali, serta di Hulu Langkat Selangor-Malaysia)*, Program Pascasarjana Ilmu Administrasi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.

Oka Parwata, A.A. Gede, 2019, *Model Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia yang Berkelanjutan*, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar-Bali.

Sandiasa, I Gede, 2015, *Implementasi Kebijakan Sistem Irigasi Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus di Subak Lawas dan Subak Pebantenan di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)*, Program Doktor Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Supriyono, Harry, 2011, *Kajian Yuridis Sistem Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan*, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sriartha, I Putu, 2015, *Kajian Spasial Keberlanjutan Sistem Subak yang Berlandaskan Tri Hita Karana di Kabupaten Badung Provinsi Bali*, Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Geografi, Fakultas Geografi Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Windia, Wayan, 2003, *Transformasi Sistem Irigasi Subak yang Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana*, Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **C. TESIS**

Juni Hartini, Made Ayu, 2017, *Pengelolaan Subak oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali Sebagai Warisan Dunia dalam Melestarikan Nilai-Nilai Kearifan Lokal*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

## **D. JURNAL**

Anom, I Putu, Suryasih, I. A., Nugroho, S, dan Mahagangga, I G. A. Oka, 2017, "Turismemorfofosis: Tahapan selama seratus tahun perkembangan dan prediksi pariwisata Bali", *Jurnal Kajian Bali*, Volume 07, Nomor 02, Oktober 2017, Denpasar.



- Cole, Stroma dan Mia Browne, 2015, "Tourism and Water Inequity in Bali: A Social-Ecological Systems Analysis", *Human Ecology*, 43:439–450, DOI 10.1007/s10745-015-9739-z, Springer.
- Fikret Berkes dan Helen Ross, 2012, *Community Resilience: Toward an Integrated Approach*, Society & Natural Resources: An International Journal, Vo.26, No.1, Routledge.
- Graeme S. MacRae dan I.W.A. Arthawiguna, 2011, *Sustainable Agricultural Development in Bali: Is the Subak an Obstacle, an Agent or Subject?*, Human Ecology, Vol. 39, No. 1 February 2011, Springer.
- Hasima, Rahman, 2020, "Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment Dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Kota Kendari", *Halu Oleo Law Review*, Vol.4, Issue 1 Maret 2020, Kendari
- Indrati S, Maria Farida, 2007, "Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan diIndonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 4, No. 2-Juni 2007, Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Kristyanto, Eko Noer, 2017, "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Di Daerah (Local Wisdom Position and Role of Society in Spatial Planning in the Region)", *Jurnal Rechtsvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, Vol.6 No.2, Agustus 2017, Jakarta.
- Lawalata, Greece Maria, 2013, "Prinsip-Prinsip Pembangunan Jalan Berkelanjutan", *Jurnal Transportasi, Forum Studi Transportasi Antar-Perguruan Tinggi Universitas Katolik Parahyangan*, Vol. 13 No.2 Agustus 2013, Bandung.
- Lorenzen, Rachel P., 2015, "Disintegration, formalization or reinvention? Contemplating the future of Balinese irrigated rice societies", *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, Vol.16, No.2, Taylor & Francis, The Australian National University.
- Lorenzen, Rachel P. dan Stephan Lorenzen, 2008, "Institutionalising The Informal: Irrigation And Government Intervention In Bali", *Development Journal*, Vol. 51.1 (77-82), Palgrave Macmillan, Society for International Development.
- Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung, A.A. Gede Oka Parwata, dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2021, "Orientasi Kesejahteraan dalam Pengaturan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia", *Jurnal Kertha Patrika FH UNUD*, Vol.43 No.1 April 2021, Denpasar-Bali.



- Nordholt, Henk Schulte, 2011, “Dams, Dynasty, And The Colonial Transformation Of Balinese Irrigation Management”, *Human Ecology Journal*, Vol.39 No.1, Springer.
- Pranadji, Tri dan Rita Nur Suhaeti, 2012, “Masa Depan Pertanian-Perdesaan di Bali Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Daerah (The Future of Bali’s Rural-Agriculture In A Regional Development Planning Perspective)”, *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Volume 10 No.3, September 2012, Jakarta.
- Satria, Rahmad, 2015, “Penerapan Metode Regulatory Impact Assesment (RIA) Dalam Penyusunan Regulasi Daerah”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum UNDIP*, Vol.44 No.2 (2015), Semarang.
- [Schaublin](#), Brigitta Hauser, 2011, “Land donations and the gift of water: On temple landlordism and irrigation agriculture in pre-colonial Bali”, *Human Ecology Journal*, Vol.39 No.1, Springer.
- Suprpto, Putu Adi, 2015, “Dampak Pembangunan *Bypass* Ida Bagus Mantra Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Provinsi Bali”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.1, No. 1, Pebruari 2015, Universitas Pendidikan Ganesha
- Suryada, I.G.A.B., 2018, “Konsepsi Tri Mandala dan Sanga Mandala Dalam Tataran Arsitektur Tradisional Bali”, *Jurnal Sulapa*, Edisi 4 Vol.1, Universitas Bosowa, Makasar
- Suyastiri, Ni Made Y.P., “Pemberdayaan Subak Melalui “Green Tourism” Mendukung Keberlanjutan Pembangunan Pertanian Di Bali”, *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis UNS*, Vol. 8 No. 2 Pebruari 2012.
- Tarigan, Herlina, Dharmawan, Arya H. Tjondronegoro, SMP dan Suradisastra, Kedi, 2013, “Persaingan Akses Sumber Daya Air di Yeh Ho Tabanan Bali”, *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol.31 No.2, **Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian**, Kementerian Pertanian.
- Triyono, Rachmat, 2012, “Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-undangan (Alternative of Rule and Regulation Analysis Model)”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.1 No.3 Desember 2012, Jakarta
- Suyoga, I Putu Gede., 2017, “Ruang Ideal Bali Dalam Tekanan Globalisasi”, *Jurnal Dharmasmerti Ilmu Agama dan Kebudayaan*, Vol. XVI Nomor 01 April 2017, UNHI, Denpasar.



Windia, Wayan., “Kebertahanan Subak di Era Globalisasi”, *Jurnal Bappeda Litbang Bali Membangun Bali*, Vol. 1 No.2 Agustus 2018.

#### **E. MAKALAH**

Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, 2019, *Penyusunan Raperpres Rencana Tata Ruang KSN Kawasan Subak Bali Landscape*, Materi FGD tanggal 11 Oktober 2019, Kuta-Badung.

Oka Parwata, AA Gede dan Dewa Gde Rudy, 2017, “Realisasi Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Dunia Di Bali”, *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi IV 15-16 Desember 2017 “Inovasi Humaniora, Sains Dan Teknologi Untuk Pembangunan Berkelanjutan”*, Universitas Udayana.

#### **F. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya yang terakhir dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014.

Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 dan ditetapkan kembali menjadi Undang-Undang No.6 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2006 tentang Irigasi



Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) No.26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Peraturan Presiden RI No.78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak benda).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.34/MNLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah.



Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah.

Perda Prov. Bali Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005–2025.

Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023.

Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Perda Provinsi Bali No.2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043.

Perda Provinsi Bali No.8 Tahun 2015 tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi.

Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak.

Peraturan Gubernur Bali No.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

## **G. INTERNET**

Adnyana, I Wayan Sui, 2020, “APBD Provinsi Bali untuk Sektor Pertanian di Bawah 2 Persen Ini Jawaban Sekda Dewa Made Indra”, <https://bali.tribunnews.com/2020/11/30/apbd-provinsi-bali-untuk-sektor-pertanian>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.

Arnstein, Sherry R., 1969, "A Ladder of Citizen Participation," <https://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2021

Artanegara, 2016, “Obyek Wisata Sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan sebagai Warisan Budaya Dunia”, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbali/obyek-wisata-sepanjang-daerah-aliran-sungai-das-pakerisan-sebagai-warisan-budaya-dunia/>, diakses pada tanggal 14 April 2019.



- Aryawan, I Made Prasetya, 2017, “Miris, Alih Fungsi Lahan Pertanian di Badung tak Terbendung”, <https://bali.tribunnews.com/2017/07/09/miris-alih-fungsi-lahan-pertanian>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021.
- Badan Pusat Statistik Bali, 2015, “Luas lahan Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali 2015”, <https://bali.bps.go.id/index.php/pencarian?keywordforsearching=lahan+pertanian>, diakses pada tanggal 30 April 2021
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2019, “Luas Lahan Per Kabupaten/ Kota Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali”, <https://Bali.bps.go.id/statictable/2018/04/11/72/luas-lahan-per-kabupaten-kota-menurut-penggunaannya-di-provinsi-Bali-2017.html>, diakses pada tanggal 30 Juli 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2002, “Badung Dalam Angka 2002”, <https://badungkab.bps.go.id/publication/2002/10/30/ee9fe77f5f8ae9bc457d1f8d/badung-dalam-angka-2002>, diakses pada tanggal 15 Pebruari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2019, “Badung Dalam Angka 2019”, <https://badungkab.bps.go.id/publication/2019/08/16/2d0172b055aca2ff8b868bce/kabupaten-badung-dalam-angka-2019>, diakses pada tanggal 15 Pebruari 2020.
- Balipost, 2022, “Subak Dalam Tata Ruang Kota”, <https://www.balipost.com/news/2022/05/27/270779/Subak-dalam-Tata-Ruang-Kota.html>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022.
- \_\_\_\_\_, 2022, “Dewan Pertanyakan Besaran Alih Fungsi Lahan Pertanian”, <https://www.balipost.com/news/2022/08/29/288674/Dewan-Pertanyakan-Besaran-Alih-Fungsi...html>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.
- \_\_\_\_\_, 2021, “Jumlah Subak di Jembrana Menyusut”, <https://www.balipost.com/news/2021/09/17/216057/Jumlah-Subak-di-Jembrana-Menyusut.html>, diakses pada tanggal 2 November 2022.
- Bali Water Protection, 2018, “Rilis Pers Hasil Penelitian Program Bali Water Protection 2018-Yayasan IDEP Selaras Alam-Politeknik Negeri Bali” [https://baliwater\\_protection.net/rilis-pers/](https://baliwater_protection.net/rilis-pers/) , diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.
- Bali, Bisnis, 2022, “Tiga Tahun Terakhir di Tabanan, Alih Fungsi Lahan 322,15 Hektar”, <http://bisnisbali.com/tiga-tahun-terakhir-di-tabanan-alih-fungsi-lahan-32215-hektar/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.
- Bappeda Provinsi Bali, 2019, “Ka Bappedalitbang Buka FGD Penyusunan Raperpres RTR KSN Subak Bali Landscape”



<https://bappeda.baliprov.go.id/2019/10/12/ka-bappedalitbang-buka-fgd-penyusunan-raperpres-rtr-ksn-subak>, diakses pada tanggal 6 November 2021.

Bappenas, “Sekilas SDGs”, <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

Berkarya, Bali, 2021, “Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk Mengwi Berjalan dan Negosiasi November Selesai”, <https://www.baliberkarya.com/read/202109060002/pembangunan>, diakses pada tanggal 3 November 2021

Biermann, Frank, Stevens, Casey, Bernstein, Steven, Gupta, Aarti, Kabiri, Ngeta, Kanie, Norichika, Levy, Marc, Nilsson, Mans, Pinter, Laszlo, Scobie, Michelle dan Young, Oran R., 2014, “Integrating Governance into the Sustainable Development Goals. POST2015/UNU-IAS Policy Brief #3”, United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS), Tokyo, Japan, hlm.2., diakses dari [https://collections.unu.edu/eserv/UNU:1825/Post2015\\_UNU-IAS\\_Policy\\_Brief3.pdf](https://collections.unu.edu/eserv/UNU:1825/Post2015_UNU-IAS_Policy_Brief3.pdf), pada tanggal 12 Maret 2022.

Databoks, 2021, “Kesejahteraan Petani Bali Terendah Nasional pada Oktober 2021”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/kesejahteraan-petani-bali-terendah-nasional-pada-oktober-2021>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

Detik, 2023, “17.835 Hektare Sawah di tabanan Tak Boleh Diutak-atik”, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6751195/17835-hektare-sawah-di-tabanan-tak-boleh-diutak-atik>, diakses pada tanggal 4 Juni 2023.

Devita, Rindra, 2020,” Perda RTRWP Diubah, WALHI Bali Ajukan Protes”, <https://www.balipost.com/news/2020/05/30/126253/Perda-RTRWP-Diubah,Walhi-Bali...html>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2020.

Diez, Cristina, 2015, “Good Governance in the Context of Extreme Poverty (International Movement Atd Fourth World)”, disampaikan pada Constructing a Post-2015 Review and Follow Up Mechanism International Movement Atd Fourth World on the Post-2015 development agenda 26-27 May 2015, hlm.1., <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/6673adt.pdf>, diakses pada tanggal 11 Maret 2022.

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, 2021, “Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Subak dan Subak Abian Provinsi Bali Tahun 2021”, <https://dpma.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2021/10/JUKNIS-BKK-SUBAK-DAN-SUBAK-ABIAN-2021.pdf> , diakses pada tanggal 18 Desember 2021.



- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2019,” Rekapitulasi Luas Baku Lahan Menurut Jenis Lahan Tahun 2013-2017”, <https://distanpangan.baliprov.go.id/rekapitulasi-luas-baku-lahan-menurut-jenis-lahan-tahun-2013-2017/> , diakses pada tanggal 23 Maret 2020.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulonprogo, 2019, “Sejumlah Hambatan yang Perlu Disempurnakan dalam OSS”, <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/543/sejumlah-hambatan-yang-perlu-disempurnakan-dalam-oss>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022.
- Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, 2022, “Protaru\_”, <https://tataruang.atrbpn.go.id/protaru/Search/DaerahByProgress?provinsi=51>, diakses pada tanggal 2 Pebruari 2022.
- \_\_\_\_\_, 2021, “Monitoring dan Evaluasi RTR Nasional”, <https://tataruang.atrbpn.go.id/protaru/Rtr/SearchResult?ReturnPage=%2FIndex&Perda=0&JenisRtr=102000>, diakses pada tanggal 7 Pebruari 2022.
- Eurazmy, 2019, “Subak Lestari Denpasar Terisisa 9, Lahan Produktif Kian Menyusut Paling Masiv di Denpasar Selatan”, <https://bali.tribunnews.com/2019/08/25/subak>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2021
- Fajar, Jay, 2021, “Ketika Debit Air Subak dan Kualitas Tanah Menurun”, <https://www.mongabay.co.id/2021/09/08/ketika-debit-air-subak>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2022.
- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020, “Ringkasan Eksekutif Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)”, <https://law.ugm.ac.id/ringkasan-eksekutif-kertas-kerja-uu-cipta-kerja-fh-ugm-5-november-2020/>, diakses pada tanggal 9 Januari 2021.
- Glory, Bali, 2017, “Subak: Sistem Pengairan Sawah (Irigasi) Tradisional Bali”, <http://www.id.baliglory.com/2016/04/subak>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2020.
- Halim, Miftahuddin, 2019, “Alih Fungsi Lahan Tinggi, Lahan Persawahan di Badung Mulai Terkikis”, <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/03/17/125556/alih-fungsi-lahan-tinggi-lahan-persawahan-di-badung-mulai-terkikis>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2021.



- Humaniora, 2019, “Status Warisan Dunia Subak Terancam Dicabut”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/230162-status-warisan-dunia-subak-terancam-dicabut>., diakses pada tanggal 17 April 2019.
- Indonesian Center for Environmental Law, 2020, “Catatan Atas RUU Cipta Kerja”, <https://icel.or.id/wp-content/uploads/CATATAN-ATAS-RUU-CIPTA-KERJA-ICEL-13.02.20.pdf>, diakses pada tanggal 6 Januari 2021.
- IUCN, 2016, “Environmental Rule of Law”, <https://www.iucn.org/our-union/commissions/world-commission-environmental-law/our-work/history/foundational-documents-4>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023.
- IUCN, 2016, “IUCN World Declaration on the Environmental Rule of Law”, [https://www.iucn.org/sites/default/files/2022-10/world\\_declaration\\_on\\_the\\_environmental\\_rule\\_of\\_law\\_final\\_2017-3-17.pdf](https://www.iucn.org/sites/default/files/2022-10/world_declaration_on_the_environmental_rule_of_law_final_2017-3-17.pdf), diakses pada tanggal 23 Maret 2023.
- Marion Davis, 2015, “Mengelola Lanskap Budaya Hidup (Pembelajaran dan Wawasan dari Subak Bali, Sebuah Situs Warisan Budaya Dunia UNESCO)”, Stockholm Environment Institute, <https://www.jstor.org/stable/resrep02790>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.
- Muhajir, Anton, 2019, “Nasib Jatiluwih Setelah Menjadi Warisan Budaya Dunia [2]”, <https://www.mongabay.co.id/2019/04/27/nasib-jatiluwih-setelah-menjadi-warisan-budaya-dunia-2/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2019.
- Nata, Rusadi, 2015, “Ancaman Boikot Jatiluwih Kepala Disbudpar Tabanan Bereaksi Seperti ini”, <http://kabardewata.com/headlines/ancaman-boikot-jatiluwih-kepala-disbudpar-tabanan-bereaksi-seperti-ini.html#.W6m9CfkzBIU>, diakses pada tanggal 15 April 2019.
- Nusa Bali, 2018, “Pasedahan Agung Pertahankan Subak di Tabanan”, <https://www.nusabali.com/berita/40975/pasedahan-agung-pertahankan-subak>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_, 2018, “2.726 Subak Berusaha Bertahan”, <https://www.nusabali.com/berita/40970/2726-subak>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2021.
- \_\_\_\_\_, 2023, “Satu Subak di Tabanan Hilang, di Denpasar 1 Subak Tidak Aktif”, <https://www.nusabali.com/berita/144445/satu-subak-di-tabanan-hilang-di-denpasar-1-subak-tidak-aktif>, diakses pada tanggal 23 Juni 2023.



- Radar Bali Jawa Post, 2020, “Danau Buyan Dirancang Jadi Pusat Wisata Berbasis Konservasi”, <https://radarbali.jawapos.com/travelling/31/07/2020/danau-buyan-dirancang-jadi-pusat-wisata-berbasis-konservasi>, diakses pada tanggal 29 November 2022.
- \_\_\_\_\_, 2021, “Dua Subak Rebutan Air, Anggota DPRD Bali Bilang Sabar”, <https://radarbali.jawapos.com/berita-daerah/dwipa/08/06/2021/dua-subak>, diakses pada tanggal 6 Juli 2021.
- \_\_\_\_\_, 2022, “Penghapusan Ribuan Hektare Sawah di Tabanan (3.100 Hektare Dihapus Demi Pariwisata Sepanjang Pantai Tabanan)”, <https://radarbali.jawapos.com/berita-daerah/dwipa/20/03/2022/3100-hektare-sawah>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.
- Rachman, Faisal, 2018, “Menjaga Konsistensi Sumbangan Devisa Bali”, <https://www.validnews.id/index.php/Menjaga-Konsistensi-Sumbangan-Devisa-Bali--lJK>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021.
- Republika, 2015, “Puluhan Subak Bali Terancam”, [https://republika.co.id/berita/koran/didaktika/15/10/05/nvqoi31-puluhan-subak-Bali\\_terancam](https://republika.co.id/berita/koran/didaktika/15/10/05/nvqoi31-puluhan-subak-Bali_terancam), diakses pada tanggal 15 April 2019.
- Sanjiwani, Wira, 2020, “Lahan Sawah di Tabanan Menyusut, Namun Jumlah Petani Tetap Bertambah”, <https://bali.idntimes.com/news/bali/ni-ketut-wira-sanjiwani/lahan-sawah>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2021
- Suara Dewata, 2020, “Tahun ini Lahan Pertanian di Badung Merosot 1.694 Hektar Menjadi Alih Fungsi Lahan”, <https://www.suaradewata.com/read/202006290020/tahun-ini-lahan-pertanian>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2021.
- Sugiari, Luh Putu, 2021, “Sektor Pertanian Mampu Menopang Ekonomi Bali”, <https://bali.bisnis.com/read/20210218/538/1358204/sector-pertanian-mampu-menopang-ekonomi-bali>, diakses pada tanggal 4 Juni 2023.
- Sukananda, Satria, 2019, “Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”, <https://www.harianbhirawa.co.id/urgensi-perlindungan>, diakses pada tanggal 14 September 2021.
- Supartika, Putu, 2021, “Lahan Pertanian di Denpasar Kembali Menyusut 212 Hektar Dalam Setahun”, <https://bali.tribunnews.com/2021/05/20/lahan-pertanian>, diakses pada Tanggal 1 Agustus 2021.
- Tribune, Bali, 2018, “Perbekel Tak Boleh Ikut Campur Dalam Urusan Kepengurusan Subak Jatiluwih”, <https://balitribune.co.id/content/perbekel>



[-tak-boleh-ikut-campur-urusan-kepengurusan-subak](#), diakses pada tanggal 20 Juli 2021

\_\_\_\_\_, 2019, “Sawah Bali Nasibmu Kini”, <https://balitribune.co.id/content/sawah>, diakses pada tanggal 30 Juli 2021.

\_\_\_\_\_, 2019, “53 Ha Lahan Pertanian di Tabanan Beralih Fungsi” diakses dari <https://balitribune.co.id/content/53-ha-lahan-pertanian>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

\_\_\_\_\_, 2021, “Terabas sawah Produktif dan Kawasan Hutan, Frontier dan WALHI Bali Kritisi Tol Gilimanuk-Mengwi” <https://bali.tribunnews.com/2021/04/22/terabas-sawah-produktif-dan-kawasan>, diakses pada tanggal 3 November 2021.

\_\_\_\_\_, 2021, “Data WALHI Bali, 480,54 Ha Lahan Pertanian Produktif terkena Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi”, <https://bali.tribunnews.com/2021/11/01/data-walhi-bali-48054-ha-lahan-pertanian>, diakses pada tanggal 3 November 2021.

\_\_\_\_\_, 2022, “1048 Hektar Tanah di Badung Surut, Alih Fungsi Lahan Jadi Perhatian Badung”, <https://bali.tribunnews.com/2022/09/11/1048-hektar-tanah-di-badung-surut-alih-fungsi-lahan-jadi-perhatian-badung>, diakses pada tanggal 30 November 2022.

UNESCO, 2012, “Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of The Tri Hita Karana Philosophy”, [https://whc.unesco.org/en/list/1194/multiple=1&unique\\_number=1836](https://whc.unesco.org/en/list/1194/multiple=1&unique_number=1836), diakses pada tanggal 24 Juli 2021.

Wandi, 2021, “Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Menjadi Acuan Utama Perizinan Berusaha”, <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/529004/kesesuaian-kegiatan-pemanfaatan>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021.

Wijaya, Pramana, 2020, “Alih Fungsi Lahan Pertanian di Bali Rata-Rata 700 Hektar Per Tahun”, <http://www.balipost.com/news/2020/01/17/99216/Alih-Fungsi-Lahan-Pertanian-di...html>, diakses pada tanggal 30 Juli 2021.

Wirnaya, 2021, “Gianyar Hadapi Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian, Tertinggi Di Kecamatan Ini”, <https://www.balipost.com/news/2021/03/31/183892/Gianyar-Hadapi-Tingginya-Alih-Fungsi...html>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2021.